

Analisis Gaya Kepemimpinan Pemerintahan Abdullah Vanath di Kabupaten Seram Bagian Timur

Oleh
MUCHLIS FATARUBA³

Abstraksi

Kebijakan pemekaran daerah dilakukan oleh pemerintah untuk merespon tuntutan masyarakat di aras lokal dengan tujuan utama mempercepat laju perbaikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik serta untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur yang dimekarkan dengan UU No. 40 Tahun 2003 ini memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, dan letaknya yang strategis di titik silang (antara kabupaten Maluku tengah, Provinsi Papua Barat dan empat kabupaten dan satu kota di Maluku tenggara) dan didukung oleh kualitas SDM yang masih cukup memadai.

Tujuan luhur pemekaran daerah diatas sangatlah kontradiktif dengan kondisi empirik di lapangan, karna berdasarkan data Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan pada Kabupaten seram Bagian Timur dari BPS Maluku tahun 2013 berada pada tingkat keparahan yang akut. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada kabupaten ini mencapai 6,8% dengan Indeks Keparahan Kemiskinan 1,88%, dalam aspek lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2013 hanya 68,09 % dan berada pada peringkat ke 11 dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, (Buku IPM kabupaten SBT,2013). Disamping itu Pendapatan Regional perkapita Kabupaten ini untuk tahun 2012 menurut Harga Berlaku adalah sebesar Rp.2.539.514,- atau mengalami penurunan sebesar 2,03 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2012 sebesar Rp.2.592.279,- sedangkan Domestic Regional Product (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2013 sebesar Rp.1.345.992,- terjadi penurunan sebesar 5,69 % dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp.1.421.452,- (PDRB, Kabupaten SBT). Angka –angka ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur Masih berada pada posisi pembangunan ekonomi dan pembangunan SDM yang masih berjalan lamban sekali. Lambannya laju pembangunan ekonomi dan SDM yang ada, sangat tergantung pada kemampuan seorang Kepala Daerah dalam melakukan fungsi menajerialnya dalam mengelola berbagai sumber daya strategis yang ada untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten ini.

Key Words : Gaya Kepemimpinan, Pemerintahan Abdullah Vanath.

A. Pendahuluan

Keberhasilan seorang pemimpin pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan menata dan mengelola mesin birokrasi. Sebagai aktor penggerak utama maka seorang pemimpin dituntut untuk mampu mengaktualisasikan Prinsip-prinsip dasar Kepemimpinan dalam mengatur dan mengurus organisasi yang dipimpinnya. Seperti dijelaskan oleh Wirjana (2005:3) bahwa Kepemimpinan lebih terkait dengan Kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu misi atau tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan berbagai elemen organisasi untuk mewujudkannya dengan memanfaatkan

³ Muchlis Fataruba – Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Pattimura, Ambon

potensi dirinya berupa kepercayaan, nilai-nilai, etika, sifat, pengetahuan dan keterampilannya.

Menurut hemat penulis, perwujudan kepercayaan, nilai-nilai, etika, sifat, pengetahuan dan keterampilan itu pada praktek yang menonjol dalam aspek tertentu kemudian melahirkan kecenderungan model maka itulah gaya kepemimpinan seseorang. Preposisi penulis berdasarkan realita yang dipaparkan lewat data diatas menggambarkan bahwa situasi konjungsi ekonomi di atas turut ditentukan oleh gaya kepemimpinan sang Bupati dalam mengelola struktur Birokrasi pada Kabupaten seram Bagian Timur.

Secara positif birokrasi dikatakan oleh Weber adalah organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik yang impersonal, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, budaya kerja yang didukung oleh spesialisasi bidang yang jelas serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal (pengawasan publik), serta bertujuan memberikan pelayanan publik yang memuaskan kepada masyarakat. Sedangkan secara Konstruktivis Hegelian, birokrasi tidak lebih dari Wadah penghubung antara Negara dan masyarakat, serta secara Marxian Birokrasi lebih terkait dengan kekuasaan struktur atas Negara menguasai struktur bawah dari penghuni Negara. Tulisan ini lebih diarahkan pada upaya pemotretan budaya kepemimpinan pemerintahan Abdullah Vanath Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, apakah praktek birokrasinya berada pada wilayah positivist, humanis-konstruktivist atau kritis-struktural disertai labeling gaya kepemimpinannya.

1. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada realita pembangunan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia seperti telah diuraikan di atas maka dapat diketengahkan masalah yang relevan dengan mapping gaya kepemimpinan yang dipraktikkan dan pada tradisi pikir apakah Gaya kepemimpinan itu diadopsi, Sehingga Masalah Pokok yang akan dikaji melalui tulisan ini adalah :

- a. Bagaimana Gaya Kepemimpinan Abdullah Vanath Dalam Praktek Pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur ?
- b. Logika Pikir Apakah yang Diadopsi Abdullah Vanath dalam Mengendalikan Pemerintahan Pada Kabupaten Seram Bagian Timur ?

2. Uraian Teoritik

Makna Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995), kepemimpinan adalah the process of directing and influencing the task related activities of group members. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan.

Lebih jauh lagi, Griffin (2002) membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses, dan sebagai atribut. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para

pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Secara filosofis Terry (Dalam Kartono 1998 : 38) lebih cenderung mengartikan Kepemimpinan sebagai aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok yang telah ditetapkan, sejalan dengan Terry, Ordway Ted (Dalam Kartono 1998 : 38), mengartikan kepemimpinan sebagai bentuk kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu atau oleh Young dalam Kartono (1998:38) lebih berbentuk dominasi perilaku yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Pendapat para ahli diatas lebih lebih mengarahkan makna kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi bawahan atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi atau kelompok, dengan menggunakan metode, berbagai sumber daya serta pengelolaan lingkungan organisasi dengan baik dan memadai.

Kepemimpinan Pemerintahan / Kepemimpinan Publik

Secara umum dapat dimaknai bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan atau secara operasional dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah penerapan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dibidang pemerintahan. Pamudji (1985:52) berpendapat dalam hubungannya dengan kepemimpinan pemerintahan Indonesia terdapat pada setiap tingkat pemerintahan, Nasional/Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, kecamatan dan juga tingkat pemerintahan kelurahan/desa. Lebih lanjut jika pengertian ini dikaitkan dengan pemerintahan daerah maka kepemimpinan pemerintahan daerah adalah penerapan dasar-dasar kepemimpinan pada umumnya dalam sistem pemerintahan di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Djopari dalam jurnal (Widyapraja No.23 Tahun XV. 1996:73), Melengkapi pendapat diatas Kaloh (2009:2) dengan menjelaskan bahwa berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka pemimpin pemerintahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dari sisi lain pemimpin pemerintahan dapat dibedakan menjadi pemimpin politik yang tersusun secara hirarkis mulai dari presiden yang dibantu para menteri, gubernur, bupati/walikota dan kepala desa/lurah dan pemimpin yang menduduki jabatan structural yaitu mereka yang menduduki jabatan secara berjenjang yang tersusun dari eselon I, II, III, IV. Para pejabat politik dan pejabat structural digolongkan sebagai pemimpin pemerintahan karena mereka adalah aktor pemerintahan yang melaksanakan fungsi-

fungsi pemerintahan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan maju serta mendapatkan pelayanan yang adil dan merata.

Pemimpin pemerintahan harus memiliki sifat, watak dan perilaku yang bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat pada umumnya, siap mengorbankan diri demi membela martabat, kehormatan dan kejayaan bangsa dan negaranya serta jauh dari sifat egois, konsumtif, serakah,provan, arogan tidak dapat mengendalikan diri .

Pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu seorang pemimpin pemerintahan harus selalu siap untuk mendengarkan dan merasakan serta menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi pemerintahan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Setiap pemimpin pemerintahan harus tanggap terhadap kondisi politik baik dalam organisasi pemerintahan maupun kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Kenyataan ini yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin pemerintahan dan kondisi ini pula yang membedakannya dengan pemimpin organisasi non pemerintahan. Pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi dua situasi dan kondisi yang berbeda di satu sisi harus menghadapi para elit politik yang berbeda tuntutannya di sisi yang lain harus menghadapi masyarakat yang berbeda pula tuntutannya. Oleh karena itu seorang pemimpin pemerintahan harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan pemerintahan dalam arti memberikan perhatian serta mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka merespon kebutuhan para elit politik dan kebutuhan organisasi pemerintahan yang dipimpinnya serta tanggap pula terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan ini seorang pemimpin pemerintahan dituntut juga untuk mengikuti perkembangan paradigma pemerintahan, sebagaimana dipahami bahwa dewasa ini telah terjadi perkembangan paradigam dalam pemerintahan yakni bergesernya sistem pemerintahan yang digerakkan oleh Visi dan Misi, memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien bukan kepada masukan (kenaikan anggaran setiap tahun) yang mengarah kepada maksimalisasi masukan dibanding maksimalisasi keluaran. Pemerintah hendaknya berperilaku *Enterpreneurshep Bureaucracy* dalam pelayanan masyarakat, Dimana masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Selain pemerintah lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja partisipatif dari pada mekanisme kerja hirarkis (Osborne dan Gaebler, 1992).

Berangkat dari pemahaman dimaksud, seorang pemimpin pemerintahan diharapkan dapat mencermati dan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan diatas secara inovatif, kreatif, produktif, dengan orientasi memposisikan masyarakat sebagai pelanggan serta berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Model Kepemimpinan Hegemonik

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu '*eugemonia*'. Sebagaimana yang dikemukakan *encyclopedia Britanica* dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polism* atau

citystates) secara individual misalnya yang dilakukan oleh negara Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993:73).

Teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci lebih terkait dengan Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral. Dalam Nezar Patria (1999:116).

Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

Secara Filosofis Roger Simon (2004:85), mengkritisi buku *Prison Notebooks* Gramsci dalam aspek transformasi kesadaran bernegara. Menurut Simon Gramsci memakai berbagai istilah yang menurutnya ekuivalen dengan ideologi, seperti kebudayaan, filsafat, pandangan dunia, atau konsepsi mengenai dunia. Demikian pula istilah 'reformasi moral dan intelektual' dan penguasaan struktur sosial dan Negara, ketika Gramsci membicarakan transformasi kesadaran sebagai prasyarat perbaikan menuju sosialisme.

Konsepsi ini sering dipakai oleh para pimpinan publik dengan mendompleng ide penguasa kepada penguasa struktur budaya (pimpinan non formal) guna penguasaan isi jiwa masyarakat melalui cara membajak hubungan reciprocal antara diantara mereka disamping penguasaan nilai hidup dan budaya serta upaya merasionalisasi berbagai unsur logika dan filsafat serta pandangan dunia akan diri mereka sebagai kekuatan kohesif untuk memperkuat daya terima masyarakat pada diri seorang pemimpin publik.

Sebagaimana halnya Marx, tetapi berbeda dengan kaum Marxis ortodoks, Gramsci menganggap dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur, bukan hanya refleksi atau ekspresi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material semata, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Sebagai kekuatan material, dunia gagasan atau ideologi berfungsi mengorganisasi massa manusia. Bagi Gramsci hubungan antara yang ideal dengan yang material tidak berlangsung searah, melainkan bersifat tergantung dan interaktif. Kekuatan material merupakan isi, sedangkan ideologi-ideologi merupakan bentuknya. Kekuatan material tidak akan dapat dipahami secara historis tanpa bentuk dan ideologi-ideologi akan menjadi khayalan individu belaka tanpa kekuatan material, dalam Faruk (2005:61-62).

Dengan demikian, ideologi bukanlah dunia khayalan atau fantasi milik perorangan, bukan pula sesuatu yang bersifat di awang-awang dan berada di luar aktivitas manusia. Ideologi adalah suatu material yang terjelma dalam aturan dan cara-cara hidup yang dilakukan oleh individu secara kolektif. Ideologi selalu memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis perilaku manusia secara kolektif sehingga menjelma dalam praktik-praktik sosial setiap orang dalam lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi di mana praktik sosial itu berlangsung.

Dikatakan oleh Roger Simon (2004:19), Gramsci memandang hegemoni sebagai langkah awal dari suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-

kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi. Cara kekerasan (represif) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, dan hakim, sedangkan hegemoni dilakukan dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai kelas atau lapisan masyarakat di bawahnya.

Secara literal menurut Nezar Patria dan Andi Arief (2003:115-116) hegemoni berarti 'kepemimpinan' yang pada jaman ini menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara 'pemimpin'. Bagi Gramsci, dalam Faruk (2005:61-62), konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep ini untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu yang lewatnya, dalam suatu masyarakat yang ada, sesuatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang bersifat memaksa.

Adapun hubungan dua jenis kepemimpinan menurut Gramsci, kepemimpinan (direction) dan dominasi (dominance) itu menyiratkan tiga hal. Pertama, dominasi dijadikan atas seluruh musuh, dan hegemoni dilakukan kepada segenap sekutu-sekutunya. Kedua, hegemoni adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatus negara atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Ketiga, sekali kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi kelas ini, baik pengarahannya maupun dominasi, terus berlanjut. Dalam Roger Simon (2004:118).

Dengan demikian, konsep hegemoni yang dikembangkan Gramsci berpijak mengenai kepemimpinan yang sifatnya 'intelektual dan moral'. Kepemimpinan ini terjadi karena adanya kesetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah atau masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin. Kesetujuan kelas bawah ini terjadi karena berhasilnya kelas atas dalam menanamkan ideologi kelompoknya.

Tafsir Gramsci tentang negara adalah sesuatu yang kompleks dan menyeluruh dari aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintah. Negara dalam perspektif Gramsci ini tidak hanya menyangkut aparat-aparat pemerintahan, melainkan juga aparat-aparat hegemoni atau masyarakat sipil, Faruk (2005:77).

Negara dengan demikian merupakan 'sebuah instrumen dari kelas atas atau penguasa' dan sebagai 'alat resepsi oleh suatu kelas terhadap kelas lainnya'. Lewat negara ini kelas atas melakukan kebijakan-kebijakan, baik yang bersifat hegemonik maupun dominatif. Tujuan dari kebijakan itu adalah untuk kepentingannya sendiri, mempertahankan kekuasaannya.

Gramsci membedakan dua wilayah dalam negara, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat sipil penting bagi konsep hegemoni karena merupakan wilayah "kesetujuan", "kehendak bebas", sedangkan masyarakat politik merupakan dunia kekerasan, pemaksaan, dan intervensi, Faruk (2005:77).

Dengan demikian, pada wilayah masyarakat sipil itulah hegemoni berlangsung karena masyarakat sipil merepresentasikan etika moral sebagai wilayah untuk menanamkan mekanisme ideologi dari kelas atas. Sementara itu, masyarakat politik merepresentasikan

hubungan-hubungan yang bersifat dominatif dalam berbagai lembaga negara, seperti angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum, dan penjara. Dengan demikian, negara dalam teori Gramsci terbentuk dari hubungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Gaya Kepemimpinan Otokratik

Gaya ini kadang-kadang dikatakan kepemimpinan terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya ini ditandai dengan sangat banyaknya petunjuk yang datang dari pemimpin dan sangat terbatasnya bahkan sama sekali tidak adanya peran serta anak buah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pemimpin otokratis adalah seseorang yang memerintah dan menghendaki kepatuhan. Ia memerintah berdasarkan kemampuannya untuk memberikan hadiah serta menjatuhkan hukuman. Gaya kepemimpinan otokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan semata-mata diputuskan oleh pimpinan. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan otokratis adalah sebagai berikut:

- Kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin;
- Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan;
- Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat;
- Tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran pertimbangan atau pendapat;
- Tugas-tugas bawahan diberikan secara instruktif;
- Lebih banyak kritik dari pada pujian, menuntut prestasi dan kesetiaan sempurna dari bawahan tanpa syarat, dan cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman.

Menurut Rivai (2003), kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Robbins dan Coulter (2002) menyatakan gaya kepemimpinan otokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan kekuasaan kepada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi partisipasi karyawan. Menurut Sukanto (2001), ciri-ciri gaya kepemimpinan otokratis :

- Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin.
- Teknik dan langkah-langkah kegiatannya didikte oleh atasan setiap waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk tingkatan yang luas.
- Pemimpin biasanya membagi tugas kerja bagian dan kerjasama setiap anggota.

Sedangkan menurut Handoko dan Reksohadiprodjo (1997), ciri-ciri gaya kepemimpinan otokratis :

- Pemimpin kurang memperhatikan kebutuhan bawahan.
- Komunikasi hanya satu arah yaitu kebawah saja.

- Pemimpin cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan kecamannya terhadap kerja setiap anggota.

Pemimpin mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan keahliannya.

B. Pembahasan

Rasyid (1999:48-49) berpendapat bahwa keberhasilan pejabat pemerintahan di dalam memimpin pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mengembangkan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Inilah yang sekaligus menjadi misi pemerintahan di tengah-tengah masyarakat.

Etika pemerintahan sebaiknya dikembangkan dalam upaya pencapaian misi itu. Artinya setiap tindakan yang tidak sesuai, tidak mendukung, apalagi yang menghambat pencapaian misi itu, semestinya dipandang sebagai pelanggaran etika. Pegawai pemerintah yang malas masuk kantor, tidak secara sungguh-sungguh menjalankan tugas yang dipercayakan padanya, minimal dapat dianggap melanggar etika profesinya. Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan (*power abuse*) untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dengan merugikan kepentingan umum, pada tingkat pertama sudah melanggar etika pemerintahan. Mungkin mereka bisa diusut untuk dibuktikan sebagai pelanggar hukum, tetapi itu akan terjadi pada tingkat lanjutan.

Dalam hubungan ini seseorang bisa saja melanggar etika dan hukum pada waktu yang bersamaan. Aparatur pemerintahan seyogianya menjadikan dirinya sebagai teladan di dalam pelaksanaan etika, hukum dan konstitusi, untuk itu pemerintah tidak dapat begitu saja mengambil hak milik seseorang tanpa kewenangan yang jelas (hukum) dan pemberian imbalan ganti rugi yang wajar (etika). Singkatnya setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan perlakuan yang adil dari pemerintah berdasarkan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku. Etika pemerintahan dengan demikian tidaklah berdiri sendiri. Penegakkannya terjalin erat dengan pelaksanaan prinsip Negara hukum. Itulah sebabnya maka sebuah pemerintahan yang bersih yang segala tingkah laku dan kebijakannya berangkat dari komitmen moral yang kuat, hanya bisa diharapkan dalam Negara hukum. Di dalam Negara kekuasaan pemerintahan yang bersih itu sulit terwujud.

Menyimak pendapat Rasyid di atas maka jika dikaitkan dengan realitas praktek pemerintahan pada Kabupaten Seram Bagian Timur maka nampak logika hegemoni diterapkan pada berbagai kebijakan sang Bupati (abdulah Vanath) dalam memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak memiliki andil dalam memilihnya pada pilkada periode pertama tahun 2005 maupun Pilkada period ke dua pada tahun 2011 yang lalu. Hasil wawancara penulis dengan Ahmad Rumahey (salah seorang Staf Bappeda Kabupaten SBT, pada tanggal 27 Agustus 2014), dijelaskan bahwa Bupati sering memberikan arahan singkat, kepada Ketua Bappeda dan bahkan sering disampaikan secara terbuka pada saat apel masuk maupun pulang kerja bahwa, " Saya instruksikan langsung kepada anda-anda semua, bahwa daerah penerangan saya harus diperhatikan berbagai situasi dan kondisi pembangunannya, oleh karena mereka itulah maka saya dapat memimpin anda-anda semua di sini, jadi jangan coba-coba untuk memperhatikan arahan saya ini. Jika terdengar arah pembangunan tidak tertuju ke sana, maka saya akan menindak kalian".

Dijelaskan pula Oleh Bapak Salim Ruanama (salah seorang tokoh masyarakat dari kecamatan Gorom Kabupaten SBT), Bahwa pernah tanggal 13 januari 2010 yang lalu, kami para tokoh masyarakat dari kecamatan Gorom bersilaturahmi dengan Bupati untuk meminta kebijakan beliau terkait penyelesaian jalan lintas pulau gorom, kepada kami Bupati menyatakan bahwa, skarang ini yang menjuadi prioritas bagi saya adalah daerah atau kecamatan yang memenangkan saya, saya mau katakana bahwa kalau mau diperhatikan maka pada pilkada mendatang pilihla saya. Saya Orangnya baik kalau Bapai-Ibu memilih saya maka apa saja terkait pembangunan yang diminta akan saya berikan lawat kewenangan saya". Dari uraian diatas jelaslah bahwa layanan pembangunan terlihat pilih kasih dan sangat diskriminatif. Jelaslah sudah bahwa langkah ini merupakan prakondisi untuk menaklukan masyarakat lewat ancaman ganjaran atau hukuman itu, guna mempertahankan kekuasaannya.

Terjadi kasus dalam dimensi lain, bantuan pemberdayaan masyarakat lewat paket program bantuan alat tangkap perikanan, pendataan yang dilakukan oleh Petugas penyuluh Perikanan diarahkan pada Kelompok Perikanan yang telah mapan secara ekonomis, dan kelompok masyarakat yang menjadi target pada pulau terisolir sungguh diabaikan karena berseberangan haluan politik.

Dalam aspek pengetasan kemiskinan masyarakat pulau terisolir yang miskin seringkali diabaikan dari beberapa royek Negara terutama pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang diturunkan oleh pemerintah. Walaupun paket program yang diturunkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, namun ketika Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dimintakan bantuan untuk menangani itu, maka petuga dilapangan diintervensi oleh Kepala Dinas Kabupaten SBT atas arah Bupati.

Dalam upaya menanamkan wacana kebaikan pada warga masyarakat SBT, maka penggunaan logika penguasaan struktur nonformal juga dilakukan dengan memberikan bantuan honorarium kepada para tokoh agama dan para penyelenggara agama di rumah-rumah ibadah, begitu pula halnya dengan para tokoh adat dan tokoh pemuda insentif yang diberikan dengan memilah para tokoh yang terlibat dalam pemenangan menjadi kelompok prioritas dalam pemberian santunan ini.

Dengan pemberian tunjangan sebagaimana dijelaskan di atas, tergambar bahwa upaya penguasaan struktur kemasyarakat lewat kesan-kesan kebaikan dilakukan guna memperdalam rasa empati dan memperkuat wacana kebaikan kebenaran moral kepada elit nonformal ini guna dapat dikendalikan dan digerakkan dalam pengamanan dan pemenangannya pada Pilkada 2011 yang lalu. Data pemilu menunjukkan hasil yang berbanding lurus dengan penggunaan logika ini Karena, pada daerah-daerah yang kerap kali mendapat bantuan adalah kantong-kantong pemenangan incumbent dalam pemilukada Kabupaten SBT pada tahun 2011 yang lalu.

Dalam praktek birokrasi, proses promosi maupun demosi sangat tergantung pada bisikan tim sukses. Penempatan pejabat dalam birokrasi sering menunggu survey internal kepada calon pejabat yang dilakukan oleh tim sukses, sehingga walaupun tidak memenuhi syarat kepangkatan dan spesialisasi ilmu sejumlah pejabat ditempatkan dngan tidak melalui sidang Baperjakat, tanpa Fit and Propert test dan tidak melalui jenjang promosi. Sebanyak tiga orang pegawai, masing-masing Baharudin Wajo, Afandi Kaimudin dan Siti Rahimah, dengan latar belakang pekerjaan sebagai guru SMA ditugaskan sebagai Camat Pada hal banyak sekali lulusan IPDN yang memiliki syarat kepangkatan dan masa

kerja yang telah layak untuk itu justru ditempatkan sebagai tenaga tatau saha pada beberapa SMA di Kabupaten ini. Dari uraian data di atas terlihat jelas bahwa pengelolaan birokrasi dan berbagai kebijakan pembangunan oleh Bupati Abdullah Vanath jelas menggunakan logika Hegemoni Gramsci dalam pengamanan kekuasaan politiknya.

Logika pengamanan kekuasaan dalam dimensi lain tergambar jelas lewat beberapa data berikut ini :

Karena Tidak mampu meredam kekritisan tokoh pemuda Seram Bagian Timur (SBT) Djabar Tianotak yang gencar mengungkap kasus dugaan korupsi di Pemkab SBT, Bupati SBT Abdullah Vanath membalasnya dengan cara memecat istri Tianotak, Erlita Laitupa, yang sehari-hari bekerja sebagai PNS di Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan SBT.

Skenario pemecatan diatur Abdullah Vanath dengan memanggil sejumlah pihak ke Pandopo Bupati di Bula yakni, Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan SBT Mirnawati Derlen, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SBT Nurbandi Latarissa. Dari penjelasan Mirnawati dan Nurbandi, tidak ada celah hukum untuk bisa memecat Erlita.

Bocoran dari pertemuan itu menyebutkan, Mirnawati Derlen menjelaskan kepada Vanath bahwa sebagai tenaga fungsional yakni petugas penyuluh lapangan (PPL), kinerja Erlita Laitupa dilihat dari laporan triwulan yang berisikan rencana kerja penyuluh, laporan bulanan penyuluh, dan daftar kunjungan PPL disertai bukti tandatangan dan cap dari kepala desa di tempat tugas. Menurut Derlen, sebagai tenaga PPL, Erlita Laitupa selalu memasukkan laporan ke dirinya sebagai pimpinan badan, tembusan ke Dinas Keuangan SBT, dan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorla) Provinsi Maluku.

Sama dengan Derlen, Kepala BKD SBT Nurbandi Latarissa juga menjelaskan bahwa ada prosedur yang harus diikuti sebelum memberikan sanksi pemecatan. Prosedur itu yakni teguran lisan, teguran tertulis pertama, hingga teguran tertulis ketiga. Apabila prosedur ini belum dilakukan, maka tindakan pemecatan belum dapat diberikan kepada seorang yang berstatus sebagai PNS. "Apapun caranya, Ita (nama panggilan Erlita Laitupa) harus dipecat," tandas Vanath saat pertemuan itu. Menurut sumber terpercaya, keputusan memecat Erlita dilakukan Abdullah Vanath karena Djabar (Suami Erlita) sangat mengusik ketenangannya dengan pemberitaan-pemberitaan di media massa yang mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi di Pemkab SBT.

Karena tidak ada solusi saat itu, Vanath lalu memanggil Camat Wakate, Abdul Khalik Rumeun, untuk menghadapnya di Pandopo Bupati. Melalui perintah Vanath, Rumeun lalu membuat surat laporan kepada Kepala BKD SBT, tembusan ke Bupati dan Kepala Inspektorat SBT, bahwa Erlita Laitupa tidak pernah melaksanakan tugas selama 364 hari. Atas dasar itulah, Kepala BKD SBT mengusulkan kepada Bupati untuk memecat Erlita Laitupa dari PNS dengan Surat Keputusan Bupati SBT Nomor: 862.8/10/2014 tertanggal 13 Januari 2014. (Harian Pagi Ambon Express, tanggal 5 April 2014). Pada tahun 2009 Bupati SBT juga pernah memecat lima PNS, karena berlawanan haluan politik, namun dari kelima PNS yang dipecat itu tidak ada yang berani melawan, lantaran ketakutan terhadap kediktatoran yang dibangun Abdullah Vanath.

Dalam kondisi yang lain kebiasaan menghina dan menampar pegawai kemudian terbawa sampai keruang publik, Abdullah Vanath, Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku.Com , 26 juni 2013) dilaporkan telah melakukan pemukulan terhadap karyawan

Lion Air Vandi Sabandar di Bandara Internasional Pattimura pada hari Sabtu (22/6) lalu karena tertinggal pesawat Lion Air JT-885 yang take off tepat pukul 07.30 Wit menuju Jakarta. Akibatnya, Vanath dilaporkan korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPTK) Polda Maluku pada hari Senin (24/6) kemarin, sehingga terbitlah Laporan Polisi bernomor : LP-B/56/VI/2013/SPTK Polda Maluku yang diterima oleh BA SPTK II Brigadir Polisi Stevi Alfons. Kuasa hukum korban, Adolf Seleky, SH mengungkapkan bahwa dalam laporan polisi tersebut Abdulah Vanath terancam melanggar pasal 351 KUHP (penganiayaan).

Sebelumnya, tindakan penganiayaan itu sempat dilaporkan korban ke Polsek Bandara namun pihak kepolisian di sana menyatakan bahwa hal itu hanyalah kesalahpahaman sehingga tidak perlu diperpanjang. Terlebih lagi pimpinan Lion Air menyarankan kepada korban agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi korban tetap merasa keberatan sehingga pimpinannya mengancam akan memberhentikannya sebagai karyawan.

Kronologis insiden, Setiba di Bandara Internasional Pattimura, Abdullah Vanath tidak langsung menuju ruang tunggu bandara namun justru mampir terlebih dahulu ke Café Tom's yang terletak tak jauh dari ruang tunggu keberangkatan. Saking asyiknya berbincang dengan koleganya, Vanath tidak mendengar pengumuman keberangkatan pesawat Lion Air yang akan ditumpangnya menuju Jakarta.

Vanath akhirnya marah-marah di Garbarata Atas sehingga salah satu karyawan perusahaan penerbangan Lion Air Vandi Sabandar menghampiri dan kemudian mengantarkan Vanath menemui pimpinannya. Namun karena tidak menerima kenyataan tersebut, dalam perjalanan menemui pimpinan Lion Air, Vanath tiba-tiba menampar Vandi pada pipi sebelah kirinya hingga mengalami luka memar.

Tindakan lain yang dilakukan oleh Bupati SBT Abdullah Vanath adalah dengan memecat sejumlah bawahannya karena dendam politik terus menuai kecaman. Alasan pemecatan dinilai tak rasional karena tak sesuai kenyataan yang terjadi. Anehnya PNS yang aktif melaksanakan tugas dipecat, sementara sejumlah narapidana justru diberi jabatan hingga saat ini. Begitu juga dengan sejumlah PNS yang menjadi tim pemenangan.

Ketua AMB, M Jafar Tukuwain kepada Haarian Pagi Siwalima, di Ambon, Senin (7/4) menjelaskan, kebijakan pemecatan itu sangat tidak manusiawi padahal masih banyak PNS lainnya yang ternyata lebih parah lagi dan tidak pernah menjalankan tugas malah tidak dipecat justru dipromosikan dan menerima gaji dengan lancar. "Ini hanya alasan bupati saja. Secara kasat mata jelas itu dendam politik saja dan dendam atas semua gerak-gerik yang diperjuangkan oleh suami Erlita menyuarakan kebenaran yang kemudian dibalas dengan tindakan tak terpuji kepada sang istrinya yang justru tidak tahu apa-apa," ungkapnya.

Tukuwain merincikan PNS yang kini justru menjadi tim sukses. Para PNS itu bahkan tidak pernah menjalankan tugas tetapi diberikan jabatan serta menerima gaji dengan lancar. Para PNS tersebut diantaranya, Musalam Rumalean, (guru SD Guliur Kesui). Sejak diangkat tahun 2006 hingga kini tidak jelas tempat tugasnya. Hanya bertugas pada momentum politik sebagai tim pemenangan sekaligus informan bupati untuk PNS-PNS yang tidak bekerja untuk kepentingan politik bupati. PNS lainnya yaitu Minarti Armin (Penyuluh Perikanan) yang adalah ponakan Kepala BKD Kabupaten SBT hingga kini tidak

pernah turun ke tempat tugas di Kecamatan Pulau panjang, namun gaji lancar dan tidak pernah dikenakan sanksi. Rasyid pelupessy (Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Perindustrian SBT), sebelumnya menjadi koordinator tim pemenang DAMAI dan kini berlanjut menjadi jadi tim sukses Rohany Vanath istri bupati caleg DPR nomor urut 1 dari PKB dapil Maluku. Berbulan-bulan sampai saat ini masih berada di Kota Ambon menjadi timsus. M Thalib Kelian (Kasubag Keuangan di Kecamatan Tutuktolo) dikenal sebagai PNS khusus musik untuk mengiring Bupati SBT bernyanyi di pendopo. Sebagai timsus utama bupati sehingga tidak pernah masuk kantor tetapi gaji lancar dan selalu mendapat promosi jabatan. Samar Gurium (Kepala SD Kulugowa yang juga rangkap caretaker Kepala Desa Administratif Kulugowa). Yang bersangkutan hanya datang bertugas ketika momentum politik dan menjadi tim sukses bupati tetapi gaji lancar. Linda (istri Rudy Maloky yang adalah orang dekat bupati serta staf di Dinas PU SBT), tidak pernah masuk kantor tetapi gajinya tetap dibayar lancar. Ada juga Lili Suryaningsi (Sekretaris Bupati yang merangkap Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin Pegawai BKD SBT) dilantik satu tahun lalu tidak pernah masuk kantor BKD tetapi selalu mendapat promosi jabatan. Bukan hanya itu, terdapat juga nama Ridwan Ruminim (Staf BKD Kabupaten SBT). Ia menjadi tim sukses utama bupati yang selama berbulan-bulan tidak masuk kantor tetapi gajinya lancar. Begitu juga, dengan Nizar Alkatiry (Pejabat Kepala Desa Gusalaut-Werinama sejak akhir tahun 2010. Yang bersangkutan ternyata satu tahun satu kali baru turun ke tempat tugas. Sahril Voth (Peraway Puskesmas Werinama) tidak pernah menjalankan tugas, namun gajinya tetap lancar. MS Rumasoreng (Camat Kelmury), sejak dilantik menjadi camat hingga kini tidak pernah ke tempat tugas nyaris sama dengan Camat Wakate Abdul Halik Rumeon. Hanya tugas saat momentum politik dan pembagian raskin.

Tak hanya Tukuwain yang mengancam, hal sama pula di sampaikan oleh Hamid Rumbaru tokoh pemuda SBT. Bahkan, menurut Rumbaru langkah Vanath terlalu tampak penuh dengan dendam kesumat. "Ini jelas dendam. Karena tidak rasional alasannya. Lalu bagaimana dengan PNS kasus-kasus korupsi dan lainnya yang pernah dan sementara menjalani hukuman penjara malah diberi keistimewakan dan diberi jabatan serta gajinya lancar. Sementara Erlita yang jelas-jelas menjalankan tugas malah dipecat dengan alasan yang mengada-ada," kesal Rumbaru. Rumbaru mencontohkan, pejabat Pemkab SBT Marwan Lanip yang divonis 9 tahun penjara, Janiadin (3,6 tahun penjara), Siti Baduri (1,6 tahun penjara), H Sarlo (3,8 tahun penjara), Abdurahman Mahu (3 tahun penjara). Bahkan Tedy Sibualamo mantan Kadis Pertanian SBT terpidana kasus korupsi petakan sawah yang dipenjara empat tahun malah dilantik sebagai Kepala Bappeda. Ia bahkan kini mengatur Bappeda dibalik jeruji besi. Begitu juga dengan Hasan Suwakul, mantan Kadis Pendidikan SBT yang divonis 2,2 tahun penjara dalam kasus DAK Pendidikan SBT yang kini menjabat selaku kadis pariwisata. "Adakah aturan yang membenarkan napi jadi pejabat untuk mengatur birokrasi dari balik jeruji besi? Kenapa Erlita Laitupa seorang ibu rumah tangga dengan empat anak yang justru meninggalkan suami dan anak-anak melaksanakan tugas ditempat pembuangan dipecat. Sungguh naif hanya karena perbuatan suaminya Djabar Tianotak yang selalu mengadvokasi kasus-kasus korupsi, kewenangan-wenangan penguasa, kezaliman dan sistem perbudakan PNS di SBT tetapi istrinya dikorbankan," Kesal Rumbaru.

Dari aparan data empirik di lapangan menggambarkan bahwa *mapping* perilaku kepemimpinan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur terlihat sudah Sangat Otoriter, Dikatakan demikian karena berbagai langkah pemecatan, penganiayaan, intimidasi dan ketidakadilan bagi pegawai dalam aktifitas kepemimpinannya dilakukan guna mempertahankan kekuasaannya.

C. Kesimpulan

Hegemoni berlangsung karena masyarakat sipil merepresentasikan kepatuhan dan pembangkangan sebagai wilayah untuk menanamkan atau menolak mekanisme ideologi dari kelas atas. Bagi masyarakat politik merepresentasikan hubungan-hubungan yang bersifat dominatif dan penyebaran nilai filantropi politik seperti diuraikan di atas, hanya semata-mata dengan maksud menanamkan kebaikan sebagai niatan untuk memperkuat wawasan politiknya dalam upaya melindungi kekuasaannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan konstruksi logika hegemoninya Gramsci Abdullah Vanath mampu mempertahankan kekuasaannya hingga period ke dua pemilihan Bupati pada Kabupaten ini.

Dari aparan data empirik di lapangan menggambarkan bahwa *mapping* perilaku kepemimpinan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur terlihat sudah Sangat Otoriter, Dikatakan demikian karena berbagai langkah pemecatan, penganiayaan, intimidasi dan ketidakadilan bagi pegawai dalam aktifitas kepemimpinannya dilakukan guna mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian Praktek Pemerintahan Abdullah vanath Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur selama ini Bercorak Hegemonik-Otoritarian.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Maluku , Buku Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2013.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Buku Laporan Implementasi Program PEMP Tahun 2012.
- Faruk, 2005, Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Griffin, Ricky W., 2002, (Texas A & M University), Manajemen, Erlangga, Jakarta.
- Hendarto, Heru, 1993, Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci : dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Gramedia, Jakarta.
- Harian Pagi Ambon Express, 10 April 2014.
- Harian Pagi Siwalima , 08 April 2014.
- Hendarto, Heru, 1993, Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci : dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Gramedia, Jakarta.
- Kaloh, Johanis., 2009, Membangun Kepemimpinan Yang Efektif Bagi Pemerintahan Di Indonesia, IPDN Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Maluku.Com , 26 juni 2013, diakses 27 agustus 2014.
- Nezar Patria, 1999, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pamudji. S., 1985, Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia, P.T. Bina Aksara, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian timur, Buku Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2013.

- Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian timur , Buku IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013.
- Sedarmayanti., 2009, Reformasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan, Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik, Refika Aditama, Bandung.
- Roger Simon, 2011, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert Jr., 1995, *Manajemen: jilid I*, Prenhallindo, Jakarta.
- Rivai, Veithzal., 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Robbins, Stephen P., Coulter, Mary, 2002, Management, Prentice Hall, Cornell University, Australia.
- Ryaas Rasyid. (1999), Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Soekanto Reksohadiprodjo, 2001, Manajemen Personalialia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- T. Hani, Handoko dan Sukanto Reksohadiprodjo, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Wirjana, Bernardine R., 2005, Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya, Penerbit Andi, Yogyakarta.